

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) merupakan suatu kerangka konseptual dalam bidang manajemen dan etika bisnis yang menegaskan bahwa perusahaan atau organisasi tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga terhadap berbagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984 melalui karyanya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, yang mengalihkan orientasi dari paradigma tradisional berfokus pada maksimalisasi keuntungan pemegang saham menuju pendekatan yang lebih holistik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Freeman (2010) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi”. Para pemangku kepentingan ini dapat diklasifikasikan menjadi pihak internal seperti karyawan dan manajer serta pihak eksternal, termasuk pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Teori *Stakeholder* oleh Edward Freeman. Teori ini menekankan bahwa organisasi harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang terpengaruh (*stakeholders*), seperti pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, teori pemangku kepentingan mendorong penerapan praktik seperti dialog dengan para *stakeholder* serta pelaporan keberlanjutan, karena tingkat kepuasan *stakeholder* dapat berkontribusi pada tersedianya dukungan sumber daya yang perlu bagi organisasi. Dalam konteks penelitian ini, relevansi teori tersebut menjadi signifikan karena PDU sebagai organisasi yang bergerak di sektor daur ulang limbah berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk karyawan, pemasok

bahan baku, konsumen produk daur ulang, masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta lingkungan sekitarnya. Penerapan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan keuangan dan operasional perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan tersebut guna mewujudkan keberlanjutan dan memperoleh legitimasi sosial.

2. Teori Kepengurusan (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan cabang ilmu manajemen yang berasumsi bahwa manajer (*steward*) secara hakiki terdorong untuk bertindak demi kepentingan organisasi daripada mengejar keuntungan pribadi. Seorang *steward* memandang keberhasilan organisasi sebagai cerminan keberhasilan dirinya. Konsep ini menekankan pentingnya kepercayaan, kemitraan, serta orientasi jangka panjang dalam hubungan pengelolaan. Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa *steward* adalah individu yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan mengidentifikasi keberhasilan organisasi sebagai bagian integral dari keberhasilan personalnya. Dengan demikian, motivasi *steward* lebih berfokus pada pencapaian tujuan organisasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kepuasan pribadi diperoleh melalui peningkatan kinerja organisasi, sehingga *steward* secara alami terdorong untuk menunjukkan tanggung jawab serta mengupayakan optimalisasi nilai organisasi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, teori *stewardship* menegaskan bahwa perilaku pengelola yang bertanggung jawab berakar pada nilai-nilai internal, integritas, serta komitmen terhadap keberlanjutan organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, teori *stewardship* menjadi dasar konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana pengelola PDU berperan sebagai pemangku amanah publik dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan dan operasional. Pengelola PDU tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dan moral untuk memastikan proses daur ulang berlangsung secara transparan, efisien, serta selaras dengan tujuan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Prinsip *responsibility* dalam tata kelola pada dasarnya konsisten dengan asumsi *stewardship*, yaitu bahwa pengelola bertindak secara pro-organisasi dan mengutamakan keberlanjutan dibandingkan kepentingan pribadi. Ketika

pengelola PDU menunjukkan perilaku yang akuntabel dalam pencatatan keuangan, penggunaan anggaran, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan operasional harian, tindakan tersebut merefleksikan nilai-nilai *stewardship*, yakni komitmen dalam menjaga amanah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah. Dengan demikian, teori *stewardship* memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami sejauh mana implementasi prinsip *responsibility* terwujud dalam praktik pengelolaan PDU.

3. Prinsip *Responsibility* (Prinsip Tanggungjawab)

Prinsip *responsibility* atau tanggung jawab merupakan salah satu pilar utama dalam konsep *good governance* dan tata kelola organisasi yang menekankan kewajiban setiap entitas untuk melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma, dan nilai etika yang berlaku. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) prinsip ini tidak hanya mengarahkan organisasi untuk berorientasi pada pencapaian tujuan internal, tetapi juga menuntut adanya akuntabilitas terhadap seluruh kebijakan dan kegiatan yang dijalankan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara konseptual, *responsibility* telah menjadi fokus utama dalam kajian tata kelola organisasi oleh lembaga internasional seperti *World Bank* (1992), yang menegaskan bahwa tanggung jawab merupakan bentuk akuntabilitas institusi terhadap pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, serta berkelanjutan. Dalam konteks organisasi publik maupun semi-publik, prinsip ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum, penerapan transparansi, serta kesadaran atas dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil oleh organisasi.

Selanjutnya, Anthony dan Govindarajan (2014) menyatakan bahwa prinsip *responsibility* memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab manajemen dalam memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya keuangan dan operasional. Oleh karena itu, implementasi prinsip *responsibility*

memerlukan kejelasan peran, akuntabilitas pelaksana, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan objektif. Dalam konteks penelitian di PDU, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting mengingat kegiatan pengelolaan sampah memiliki risiko serta dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip *responsibility* diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan dan operasional yang sesuai dengan regulasi, transparan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses terstruktur yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan yang baik adalah memastikan bahwa dana organisasi dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Menurut Mulyadi (2016), pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang disusun secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Melalui tata kelola keuangan yang tertib dan terorganisir, organisasi dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangannya.

Dalam penyelenggaraan organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pemerintah daerah, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan SAP bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan, akuntabel,

serta mendukung partisipasi para pemangku kepentingan. Selain itu, SAP menetapkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan. Dengan demikian, setiap entitas yang mengelola dana publik, termasuk unit atau pusat daur ulang yang beroperasi dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah, dituntut untuk menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, sistematis, serta sesuai dengan standar akuntansi sektor publik yang berlaku.

Anthony dan Govindarajan (2014) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan organisasi. Dalam perspektif prinsip *responsibility*, pengelolaan keuangan menuntut adanya kejelasan dalam alokasi anggaran, kedisiplinan dalam penggunaan dana, serta keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab juga menekankan pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pendanaan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu mendukung efektivitas operasional sekaligus menjaga keberlanjutan organisasi dan lingkungan.

5. Pengelolaan Operasional

Pengelolaan operasional merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas organisasi untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fokus utama pengelolaan operasional terletak pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan prosedur kerja, agar proses operasional dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Menurut Heizer (2017), manajemen operasional merupakan

disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan sistem yang mengubah input menjadi output dalam bentuk barang maupun jasa. Pengelolaan operasional yang baik menuntut adanya perencanaan proses yang sistematis, penetapan standar operasional yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan untuk menjamin kualitas dan konsistensi hasil operasional.

Lebih lanjut, Slack (2018) menegaskan bahwa pengelolaan operasional tidak hanya berorientasi pada efisiensi proses, tetapi juga mencakup tanggung jawab organisasi terhadap aspek kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif prinsip *responsibility*, pengelolaan operasional menuntut kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi terkait keselamatan dan lingkungan, serta kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pelaksana kegiatan. Dalam konteks penelitian di PDU, pengelolaan operasional meliputi tahapan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan distribusi hasil daur ulang. Penerapan sistem pengelolaan operasional yang bertanggung jawab diharapkan dapat meminimalkan risiko operasional, menjaga kualitas hasil produksi daur ulang, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan organisasi secara menyeluruh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh penelitian penelitian sebelumnya.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nela Nafaza Kumala & Diah Hari Suryaningrum (2025) “Implementasi Penerapan Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bidang Lingkungan Pada CV Batik Murni”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV Batik Murni telah menerapkan prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di sektor lingkungan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan daur ulang kain.	Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan objek kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi CSR di sektor manufaktur, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik menganalisis penerapan prinsip <i>responsibility</i> dalam kerangka <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), dengan fokus pada pengelolaan keuangan dan operasional di PDU yang

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			bergerak di bidang pengelolaan sampah.
2.	Hanzel Favian <i>et al.</i> (2021) “Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Pada PT Pos Indonesia (PERSERO) Manado”	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja pusat pendapatan telah berjalan secara efektif dan efisien.	Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, objek kajian, serta tahun penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada penilaian kinerja pusat pendapatan di perusahaan jasa, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan prinsip <i>responsibility</i> dalam pengelolaan keuangan dan operasional pada unit pelayanan publik (PDU)
3.	Ika Helsa <i>et al.</i> (2023) “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Sambo Kecamatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Sambo dalam hal pengelolaan keuangan desa pada tahap pertanggungjawaban perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan	Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel, objek, serta konteks penelitian.

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Dolo Selatan Kabupaten Sigi)”	sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.	Penelitian sebelumnya berfokus pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik menitikberatkan pada penerapan prinsip <i>responsibility</i> dalam pengelolaan keuangan dan operasional pada PDU sebagai lembaga pengelola sampah.
4.	Riki Wahyudi (2025) “Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Sumatera Barat”	hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada Dinas DUKCAPIL Kota Bukittinggi. Adapun prinsip-prinsip GCG itu meliputi Keterbukaan (<i>transparency</i>) yakni visi, misi dan produk-produk serta pengelolaan resiko sudah diterapkan dengan baik dan dipublikasikan melalui website Dinas DUKCAPIL Kota Bukittinggi, pertanggungjawaban	Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dan objek kajian. Penelitian sebelumnya menelaah penerapan GCG secara umum pada instansi pemerintahan, sedangkan penelitian ini secara lebih

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		(<i>accountability</i>) berupa kinerja yang berkesinambungan sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanggung jawab (<i>responsibility</i>) meliputi kepatuhan terhadap perundang undangan yang berlaku dalam aturan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi setiap Dinas yang bersifat kenegaraan serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum, independen (<i>independency</i>) ini berarti mengelola secara profesional dan tanpa ada benturan kepentingan serta dapat menghindari tekanan kepentingan dari pihak mana pun, kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dalam memenuhi hal-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	terarah menganalisis prinsip <i>responsibility</i> serta implementasinya dalam pengelolaan keuangan dan operasional pada PDU.
5.	Muhammad Sigit Frediyanto (2025)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Perbedaan utama antara penelitian

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	“Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Lembaga Keuangan Mikro Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada <i>Baitul Maal Wa Tamwil Surya Madani</i>)”	penerapan GCG pada BMT Surya Madani meliputi lima aspek utama yaitu strategi, struktur organisasi, sistem operasional, kecakapan sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Strategi pengelolaan didasarkan pada visi dan misi lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Struktur organisasi yang jelas menjamin efisiensi kerja dan pembagian tanggung jawab yang baik. Penerapan sistem berbasis digital melalui E-BMT Mobile meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, pelatihan rutin bagi karyawan meningkatkan keterampilan dan profesionalisme dalam operasional lembaga.	tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel dan objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah penerapan prinsip <i>responsibility</i> pada sektor pengelolaan sampah, dengan penekanan pada aspek keuangan dan operasional.
6.	Rika Nurul Permatasari <i>et al.</i> (2025) “Analisis Praktik Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Studi Pada PT. Sur Kaltim)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam sistem akuntansi biaya dan kode rekening, perusahaan telah melakukan sesuai sistem akuntansi pertanggungjawaban. Namun, masih perlu dilakukan pembenahan dengan menambahkan kode untuk membedakan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.	Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel dan objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada akuntansi biaya serta penilaian kinerja perusahaan, sedangkan penelitian ini

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			secara spesifik menitikberatkan pada penerapan prinsip <i>responsibility</i> dalam pengelolaan keuangan dan operasional PDU.
7.	Dwi Nurchasana <i>et al.</i> (2025) “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada PT Indotruck Utama Cabang Manado”	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Indotruck Utama cabang Manado telah menerapkan prinsip prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar seluruh elemen yang terlibat dapat selaras dengan ketentuan prinsip prinsip GCG yang berlaku. Hal ini terlihat pada sisi Transparansi, keterbatasan dalam hal keterbukaan informasi pada sistem yang digunakan perusahaan. Kesimpulan, perusahaan harus menindaklanjuti ketidaksesuaian pada Transparansi guna meningkatkan efektivitas seluruh aktivitas operasional. Rekomendasi untuk perusahaan, meningkatkan keterbukaan informasi dan sistem	Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel dan objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi GCG secara menyeluruh di perusahaan swasta, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik menitikberatkan pada penerapan prinsip <i>responsibility</i> pada unit pengelolaan sampah yang berorientasi pada pelayanan publik.

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		evaluasi kinerja, memperluas CSR, meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, menjaga prinsip keadilan dan meningkatkan ketelitian karyawan.	
8.	Desak Made Mya Yudia Sari & Ida Ayu Nirma Prameswari (2023) <i>"Implementation Of Accountability and Responsibility in Governance Structure On Village Owned Enterprises"</i>	Hasil riset menyatakan pengungkapan akuntabilitas sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan, sedangkan pengungkapan responsibilitas yang kewajibannya untuk bertanggung jawaban terhadap stakeholder menerapkan prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel, tahun pelaksanaan, serta objek penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan <i>responsibility</i> pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan fokus pada tata kelola kelembagaan pemerintahan desa. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada prinsip <i>responsibility</i> dalam kerangka GCG dan menganalisis implementasinya dalam

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			pengelolaan keuangan serta operasional PDU. Selain itu, objek penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah, yang memiliki karakteristik dan dinamika operasional berbeda dari BUMDes, serta dilaksanakan pada tahun yang berlainan, sehingga konteks dan fokus kajian yang dihasilkan pun tidak sama.
9.	Nadya Nurul Sabrina & Isfenti Sadalia (2021) “Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan”	Hasil penelitian ini diuji menggunakan triangulasi sumber, kemudian dipaparkan setiap prinsip-prinsip yang sudah dilaksanakan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada subjek penelitian baik.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel, tahun pelaksanaan, serta objek kajian penelitian. Penelitian terdahulu membahas penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, yang meliputi transparansi,

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			akuntabilitas, <i>responsibility</i>, independensi, dan fairness pada suatu perusahaan. Sebaliknya, penelitian ini secara lebih terarah memfokuskan pada satu prinsip utama, yakni <i>responsibility</i>, dengan meninjau implementasinya dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Selain itu, objek kajian penelitian ini Adalah PDU yang beroperasi di sektor pengelolaan sampah, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan komersial dalam penelitian terdahulu, serta dilaksanakan pada periode waktu yang berbeda, yang menjadikan konteks dan hasil

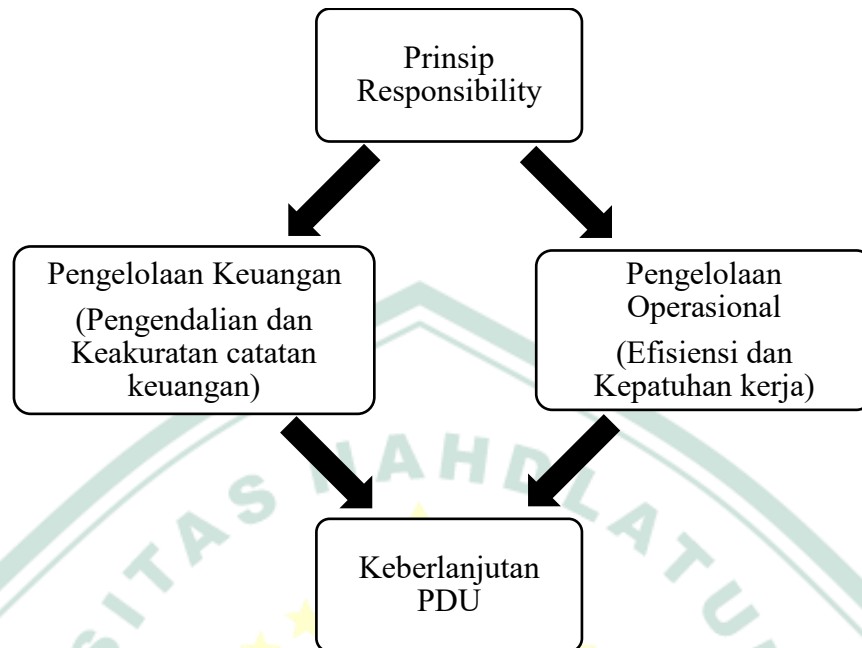
No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			kajiannya tidak serupa.
10.	Yorri Harlyandra Kafa Abdallah Kafa (2021) “Kolaborasi <i>Multi-Stakeholder</i> Pada Praktik <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Penanganan Sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran multi-stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penanganan sampah ini antara lain: PT. CEP sebagai inisiator, enabler, mentor, dan controller; kelompok Formas PL sebagai implementer dan controller; Pemerintah Desa Pengarengan sebagai regulator dan controller; kelompok PESPA sebagai implementer; tokoh masyarakat sebagai enabler dan <i>controller</i> , dan; DLH Kabupaten Cirebon sebagai regulator dan sekaligus implementer. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki tantangannya tersendiri, yakni mengupayakan adanya konsistensi para stakeholder yang terlibat dan perlunya inovasi-inovasi pengembangan, seperti pemanfaatan sampah plastik menjadi berbagai macam kerajinan atau sampah organik menjadi pupuk kompos.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel, tahun pelaksanaan, serta objek kajian penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) melalui pendekatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan (<i>multi-stakeholder</i>) dalam program penanganan sampah di Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon. Sebaliknya, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek kolaboratif dalam program CSR, melainkan menganalisis

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			penerapan prinsip <i>responsibility</i> dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Selain itu, objek penelitian ini adalah PDU sebagai unit pengelolaan sampah, bukan program CSR berbasis desa. Penelitian ini juga dilaksanakan pada periode waktu yang berbeda.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan landasan konseptual yang menyintesis teori, fakta, hasil observasi, serta kajian pustaka untuk membangun dasar yang kuat dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan ilmiah. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan alur logis penelitian, mengaitkan berbagai konsep yang relevan, serta mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data secara lebih terstruktur dan sistematis. Kerangka berpikir disusun untuk memberikan gambaran PDU mengenai pemanfaatan teori-teori relevan. Kerangka berpikir penting karena memberikan dasar logis tentang bagaimana peneliti menilai apakah prinsip *responsibility* telah diterapkan secara efektif dalam PDU Kober.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur logis yang menjelaskan keterkaitan antara variabel yang dikaji, yaitu prinsip *responsibility*, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan operasional. Prinsip *responsibility* dijadikan landasan analisis karena menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap prosedur dalam setiap proses pengelolaan organisasi, termasuk PDU Purwokerto. Prinsip *responsibility* tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam dua aspek utama penelitian, yakni pengelolaan keuangan dan pengelolaan operasional. Pada aspek pengelolaan keuangan, prinsip ini tercermin melalui praktik pengendalian serta pencatatan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup proses pengelolaan, pendokumentasian, pemanfaatan, dan pelaporan dana yang mendukung aktivitas PDU.

Pada aspek pengelolaan operasional, penerapan prinsip *responsibility* terwujud melalui upaya memastikan efisiensi kerja, pemenuhan prosedur, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku. Pengelolaan operasional yang berlandaskan akuntabilitas memungkinkan seluruh proses daur ulang berlangsung secara efektif, produktif, serta mampu meminimalkan potensi kesalahan atau

ketidakteraturan dalam pelaksanaan tugas. Kedua aspek tersebut pengelolaan keuangan dan pengelolaan operasional berperan dalam mendukung keberlanjutan PDU. Keberlanjutan dimaknai sebagai kemampuan lembaga untuk beroperasi secara stabil, akuntabel, dan berdaya guna dalam jangka panjang. Dengan demikian, semakin optimal penerapan prinsip *responsibility* dalam kedua aspek pengelolaan tersebut, semakin besar peluang tercapainya keberlanjutan PDU.

